

Pengertian-pengertian Dekonsentrasi
Dibagi dalam kelompok Anglo Saxson, kelompok Kontinental dan Undang-undang Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tabel : Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi:

Sumber	Decentralization / Devolutin	Deconcentration
World Bank (1999, found in many internet sources)	is the <i>transfer of authority and responsibility</i> for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and/or private sector.	is the weakest form of decentralization – redistributes <i>decision making authority and financial responsibilities</i> among different levels of the national government.
Bank Dunia, 1999 dalam artikel mengenai administrasi desentralisasi ¹	desentralisasi administrasi adalah pendistribusian wewenang, dan tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada badan-badan/ unit-unit kerja di bawahnya, yang terdiri dari dekonsentrasi, delegasi dan devolusi.	Bagian dari desentralisasi administrasi
UNDP (1999: 6-7) UNDP, 1999:17) ²	Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam politik, ekonomi dan administrasi.	Dekonsentrasi melibatkan transfer kewenangan yang terbatas untuk pengambilan keputusan yang spesifik dan fungsi-fungsi manajemen dengan cara-cara administratif kepada level yang berbeda namun dibawah kewenangan yuridis yang sama dari pemerintah pusat
Hellmut Wollman (2007: 2-3)	Pengalihan kekuasaan dan fungsi (termasuk sumber daya) kepada tingkat yang lebih rendah dengan kewenangan penuh dalam politik, dikenal sebagai <i>full municipalisation</i>	Fungsi administrasi dilaksanakan oleh daerah atau kantor pemerintah pusat di daerah (vertical), dikenal sebagai <i>limited municipalisation</i> .
Robertson Work (2002: 16)	Penyerahan tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan sumber daya secara penuh kepada daerah otonom	Merupakan langkah awal dari desentralisasi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan (bagian dari desentralisasi)
Hutchcroft (2001: 30)	Involves a much more <i>extensive transfer</i> of decision-making authority and responsibility to <i>local government units</i> (commonly regions, provinces, and/or municipalities).	Involves an <i>intra-organizational transfer</i> of particular functions and workloads from the central government to its regional or local offices.
(Crook dan Manor 1998, Agrawal dan Ribot 1999) ³	pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam politik-administratif dan teritorial hierarki dengan dua bentuk utama: Desentralisasi administrasi (dekonsentrasi) dan desentralisasi demokrasi/ politik, yaitu pengalihan wewenang untuk mewakili dan mempertanggung jawabkan daerahnya, seperti pemerintah daerah terpilih "(Larson 2000).	Desentralisasi administratif, mengacu pada transfer ke tingkat yang lebih rendah dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (Ribot 2002).
Manor 1999 4-5, Larson 2000) ⁴	Desentralisasi terdiri dari berbagai bentuk ⁵ yaitu <i>geographical decentralization</i> (dekonsentrasi), <i>bireaucratic/ administrative decentralization</i> (versi lain dari dekonsentrasi), <i>Fiscal decentralization</i> dan <i>democratic decentralization (political/ fuctional decentralization</i> , yaitu suatu proses dimana kekuasaan dan sumber daya diberikan kepada pihak terpilih yang mewakili populasi daerah dan sebaliknya bertanggung jawab kepada populasi daerah yang memilihnya tersebut)	Salah satu bentuk dari desentralisasi

¹Administrative Decentralization,

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTDSRE/0,,contentMDK:20246056~menuPK:390249~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390243,00.html>

² Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Vol 6 No.4 tahun 2005

³ Philip Mahwood, Local Government in the Third World (Chichester: John Wiley & Sons, 1983), B. C. Smith, Decentralization. Making Decentralization Accountable

^{4,7} Phil.Rene Oyono; March 2004; Institutional Deficit, Representation , and decentralized Forest Management in Cameroon; Elemen of Natural resources Sociology for social Theory and Public Policy.

http://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/egawp15.pdf

PBB (1999)	Penyerahan wewenang/transfer wewenang dari pemerintah pusat baik kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat di Daerah (Dekonsentrasi) maupun kepada badan-badan otonom daerah/ politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan/kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun administratif. (Devolusi).	Salah satu bentuk dari desentralisasi
Bryant C dan White L, Dore dan Woodhill, 1999: 16	Transfer kekuasaan/kewenangan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif adalah pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Sedangkan desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal.	Salah satu bentuk desentralisasi. Dekonsentrasi diartikan sebagai desentralisasi yang paling lemah (Pseudo Decentralisation) dengan beberapa alasan, yaitu istilah dekonsentrasi merujuk kepada proses pemerintahan dalam menciptakan daerah-daerah administratif untuk tujuan efisiensi manajemen program dan implementasi dari kekuasaan yang diberikan atau diturunkan dari pemerintah pusat kepada regional
Rondinelli (1999) ⁶	Desentralisasi dibagi menjadi : 1. <i>Deconcentration</i> , penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daerah. Deconcentration dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : <i>Field administration</i> dan <i>local administration</i> . <i>Local administration</i> dibagi menjadi : <i>Integrated local administration</i> dan <i>un Integrated local administration</i> . 2. <i>Delegation to semi-onomous and parastatal organizations</i> adalah suatu pelimpahan kewenangan dalam pembuatan keputusan dan manajerial dalam melaksanakan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. 3. <i>Devolution to local government</i> . Devolusi merupakan penjelmaan dari desentralisasi dalam arti luas, yang berakibat bahwa pemerintah pusat harus membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat, dengan menyerahkan fungsi dan kewenangan untuk dilaksanakan secara sendiri atau disebut dengan desentralisasi teritorial. 4. <i>Delegation to Non-government institutions</i> atau penyerahan atau transfer fungsi dari pemerintah kepada organisasi/institusi non pemerintah. Dengan sebutan lain sebagai Privatisasi, yaitu suatu bentuk pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, LSM/NGO's, tetapi juga merupakan penyatuan badan-badan milik pemerintah yang kemudian di swastakan, seperti BUMN dan BUMD dilebur menjadi Perseroan Terbatas (PT).	Salah satu bentuk desentralisasi
Dubois & fattore ⁷	Desentralisasi dibagi menjadi : 1. <i>Political decentralization</i> 2. <i>Administrative decentralization</i> 2.1 Deconcentration 2.2 Delegation 2.3 Devolution 3. <i>Fiscal decentralization</i> 3.1 <i>Fiscal decentralization and fiscal federalism</i> 3.2 <i>Fiscal federalism: the federal approach to governance</i> 4. <i>Economic decentralization</i> 4.1 Privatization 4.2 Deregulation	Dekonsentrasi merupakan bagian dari desentralisasi administrasi & salah satu bentuk desentralisasi yang paling lemah yang sering digunakan pada negara kesatuan melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada provinsi atau kabupaten/kota. . Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Rondinelli di atas yang membagi desentralisasi dalam 4 katagori (dekonsentrasi, delegasi to <i>semi-onomous and parastatal organizations</i> , <i>Delegation to Non-government institutions</i> (termasuk rpivatisasi) dan <i>Devolution to local government</i>), Dubois & Fattore membagi desentralisasi juga dengan 4 bagian ,yaitu <i>Political decentralization</i> , desentralisasi administrasi (termasuk Dekonsentrasi, Delegasi dan Devolusi), <i>Fiscal decentralization</i> , dan <i>economic decentralization</i> (termasuk privatisasi)

6 Utomo, T Widodo, 2009, Discussion Paper No. 174, Balancing Decentralization and Deconcentration: Emerging Need for Asymmetric Decentralization in the Unitary States

7 Dubois & fattore, Typologies of decentralization (2009)

Dari definisi-definisi kelompok Anglo-Saxon tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan transfer/penyerahan kewenangan dalam pengertian yang luas yang mencakup : dekonsentrasi, devolusi, privatisasi atau desentralisasi fungsional dan pengikutsertaan LSM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel : Pengertian desentralisasi & dekonsentrasi berdasarkan Kelompok Kontinental:

Sumber	Desentralisasi/devolusi	Dekonsentrasi
R. Tresna	Desentralisasi dapat dibedakan kedalam : 1. Desentralisasi jabatan (dekonsentrasi), adalah pemberian atau pamasrahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan sematamata. 2. Desentralisasi ketatanegaraan, merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan azas demokrasi dalam pemerintahan negara. desentralisasi ketatanegaraan ini dibagi menjadi : desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.	Salah satu bentuk desentralisasi
Koesoemaatmadja	Sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikutserta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari: dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik, yaitu : pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Dalam Desentralisasi politik/ketatanegaraan ini masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui saluran-saluran perwakilan. Desentralisasi politik/ketatanegaraan dibagi lagi menjadi (1) desentralisasi teritorial, yaitu : pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangga daerah masing-masing; (2) Desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu.	Salah satu bentuk desentralisasi
Amrah Moeslim	Desentralisasi dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : 1. Desentralisasi Politik, yaitu : pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengatur dan mengurus kepentingan rumahtangga sendiri bagi badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat daerah. 2. Desentralisasi Fungsional, yaitu : pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus satu macam atau segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak. 3. Desentralisasi Kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri (pendidikan, agama dll).	Bukan salah satu bentuk dari Desentralisasi
The Liang Gie	Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.	

Dari berbagai definisi kelompok kontinental tersebut dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi pada dasarnya adalah : suatu proses transfer/penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumahtangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada Daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah (Riwukaho-p.19). Sedangkan Dekonsentrasi adalah salah satu bentuk dari desentralisasi.

Lampiran 2

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
		b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi.	b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.	b. —
		c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.	c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.	c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
		2.a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).	2.a. —	2.a. —
		b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.	b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.	b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
		3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.	3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.	3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

	4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.	4. —	4. —
	5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi.	5.a. —	5.a. Pemberian izan pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
	b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.	b. —	b. —
	c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional	c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.	c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
	d. —	d. —	d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
	e. —	e. —	e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
	6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.	6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.	6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
	7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.	7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.	7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
	8. Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.	8. —	8. —

		9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia.	9. —	9. —
		10.a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional.	10.a. —	10. a. —
		b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.	b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.	b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.
2. Pembiayaan		1.a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal.	1.a. —	1.a. —
		b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1.a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.	1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.	1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
		b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

		c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.	c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.	c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
		2.a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	2.a. —	2.a. —
		b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.	b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.	b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
		3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.	3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
		b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.	b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.	b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
		2.a. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran.	2.a. —	2.a. —
		b. —	b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.	b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.a. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional.	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
		b. —	b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.	b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
		2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi.	2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.	2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota.
		3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.	3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		4.a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.	4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.	4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan.	b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan	b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
		5. —	5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah	5. —
		6. Sertifikasi pendidik.	6. —	6. —

6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional.	1. —	1. —
		2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional.	3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.	3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
		4. Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional.	4. —	4. —
		5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
	2. Evaluasi	1.a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.	1.a. —	1.a. —
		b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.	b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.	b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
		2.a. Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.	2.a. — b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.	2.a. — b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.

	3. Akreditasi	1. a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal.	1. a. —	1. a. —
		b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.	b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.	b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan.	1. —	1. —
		2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.	2. a. —	2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
		b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.	b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.	b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
		c. —	c. —	c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
		d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.	d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.	d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.







Lampiran 4

Tabel: Perbandingan Kegiatan dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen terhadap Pembagian urusan Pemerintahan:

Program/ Kegiatan	Nilai	Pemerintah	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
PAUD	10.458.310			
Perluasan dan Peningkatan Mutu TK	10.458.310	Nihil	Nihil	Sub Bidang 6. Pengendalian Mutu, Sub Sub Bidang 4. Penjaminan mutu 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
Administrasi Kegiatan	1,419,136			
Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival	4,529,174	Nihil	Nihil	Sub Bidang 2, Pembiayaan, b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Pemberian Bantuan social, Alat Olahraga TK	4,510,000	Nihil	Nihil	Idem
Wajar Dikdas 9 Tahun	17.920.611.528	Nihil	Nihil	Sub Bidang 2, Pembiayaan, b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Pembangunan gedung Perpustakaan dan PSB SD	385.700.000	Nihil	Nihil	Idem
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA	64.350.000	Nihil	Nihil	Idem
Supervisi dan evaluasi	2042692	Nihil	Nihil	Sub Bidang 6 Pengendalian mutu pendidikan, sub Sub Bidang 2 evaluasi 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
Desentralisasi Peningkatan Pendidikan Dasar (ADB)	5.500.000	Nihil	Nihil	Idem
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.119.278.565	Nihil	Nihil	Idem
Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP	264.371.396	Nihil	Nihil	Idem
Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	304.358.992	Nihil	Nihil	Idem
Perluasan dan Peningkatan Mutu PK dan PLK (Tingkat Dasar)	131.646.112	Nihil	Nihil	Idem
Pembangunan SD-SMP Satu Atap	186.880.288	Nihil	Nihil	Idem
Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP	398.883.483	Nihil	Nihil	Idem
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar	57.600.000	Nihil	Nihil	Idem

Pendidikan Menengah	2.076.611.216	Nihil	Nihil	Sub Bidang 2, Pembiayaan, b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA	433.428.626	Nihil	Nihil	Idem
Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK	115.016.574	Nihil	Nihil	Sub Bidang 1 Kebijakan, Sub Sub bidang 1, Kebijakan dn standar, c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah	479.341.912	Nihil	Nihil	Sub Bidang 2, Pembiayaan, b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah	42.886.000	Nihil	Nihil	Idem
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	223.311.960	Nihil	Nihil	Idem
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	406.026.144	Nihil	Nihil	Idem
Pembangunan Gedung Pendidikan	376.600.000	Nihil	Nihil	Idem
Manajemen Pelayanan Pendidikan	37.391.275	Nihil	Nihil	
Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen	37.391.275	Nihil	Nihil	Sub Bidang 1 Kebijakan, Sub Sub bidang 1, Kebijakan dn standar, c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
Administrasi Kegiatan	2,659,020	Nihil	Nihil	Idem
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	3,128,276	Nihil	Nihil	Idem
Pengembangan Kelembagaan	17,175,515	Nihil	Nihil	Idem
Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	14.428.464	Nihil	Nihil	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
Total	20.045.072.329	Nihil	Nihil	20.045.072.329

Lampiran 5

Tabel : Alokasi Dana Dekonsentrasi Nasional per provinsi tahun 2005 – 2009 (dalam ribuan rupiah)

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009
Nangro Aceh Darusalam	1.489.513.594	798.999.786	602.018.912	609.552.545	940.200.445
Sumatera Utara	1.048.639.363	1.459.866.633	1.403.665.575	1.431.388.554	2.188.019.737
Sumatera Barat	464.984.737	648.070.287	687.554.843	685.780.981	1.005.775.238
Riau	390.540.919	595.549.915	563.138.747	612.829.043	893.953.731
Riau Kepulauan	101.971.759	206.223.489	216.567.523	188.370.838	234.750.523
Jambi	364.457.276	460.299.405	490.213.130	427.771.432	613.602.186
Sumatera Selatan	540.834.887	795.880.155	808.822.339	794.038.599	1.092.801.428
Bangka belitung	173.844.807	251.299.010	216.571.984	208.485.201	259.452.446
Bengkulu	272.974.143	361.165.273	339.527.773	315.314.612	389.911.217
Lampung	510.358.922	898.614.636	783.544.816	835.726.308	1.254.808.314
Dki Jakarta	411.175.179	681.525.513	728.414.454	999.133.909	1.328.897.897
Jawa Barat	1.650.489.980	2.904.100.331	2.920.238.877	3.226.172.977	4.680.514.681
Banten	492.210.745	854.970.421	813.102.290	886.826.565	1.330.658.548
Jawa Tengah	1.463.039.343	2.599.841.420	2.573.528.975	2.865.185.935	4.238.577.431
DI Yogyakarta	302.044.701	459.269.277	550.105.882	482.499.053	658.015.005
Jawa Timur	1.784.651.971	2.650.161.846	2.622.251.162	2.965.027.678	4.109.773.837
Kalimantan Barat	492.054.370	602.164.288	600.709.327	587.835.547	848.923.386
Kalimantan Tengah	361.971.486	470.217.590	455.145.049	471.100.650	626.526.910
Kalimantan Selatan	394.564.095	423.687.144	367.971.978	364.299.642	474.516.412
Kalimantan Timur	385.043.154	488.164.895	470.289.452	480.465.972	628.775.789
Sulawesi Utara	325.779.734	468.883.137	414.521.537	417.180.793	530.155.240
Gorontalo	229.975.142	243.094.433	259.170.285	246.701.406	359.504.011
Sulawesi Tengah	365.390.183	477.476.688	428.007.697	425.554.571	610.399.834
Sulawesi Selatan	837.487.273	972.445.384	991.884.097	1.007.585.279	1.478.655.994
Sulawesi Barat	0	106.012.935	200.971.773	219.412.681	286.179.306

Sulawesi Tenggara	306.315.313	402.613.861	401.392.549	396.274.689	575.587.508
Bali	330.432.095	469.201.579	601.643.929	476.583.773	641.390.500
Nusa Tenggara Barat	453.142.976	612.822.042	605.807.619	601.982.607	906.657.682
Nusa Tenggara Timur	484.219.202	757.250.621	711.810.335	708.337.234	1.008.041.854
Maluku	548.919.699	604.421.750	571.449.562	345.318.271	450.044.183
Maluku Utara	499.450.724	481.268.048	452.649.426	267.256.710	289.124.503
Papua	358.320.192	531.494.482	540.462.567	457.395.443	685.750.599
Irian Jaya Barat	136.860.634	226.355.136	213.048.163	204.891.152	261.024.560
Total Dekon Nasional	17.971.658.598	24.963.413.416	24.606.202.627	25.212.280.650	35.880.970.935

Sumber data DJPK, olahan.



Tabel : Alokasi Dana Dekonsentrasi per Kementerian/Lembaga: (dalam ribuan rupiah)

Departemen/ Lembaga	2005	2006	2007	2008	2009
Arsip Nasional RI	3.650.000	3.650.000	5.077.000	4.976.000	3.927.856
BKKBN					
BKPM		5.000.000	3.206.790		
Banas Penempatan dan Perlindungan TKI					
BPKP					
BPN			170.000		
Barekons dan Rehab Aceh dan Nias	519.729.986				
Dep. Budpar			32.000.000		
Dep. Agama	76.186.736	45.444.717			
Dep. Dagri	201.448.000	107.387.175	107.118.161	243.678.178	732.149.442
Dep. ESDM	125.570.601	133.660.279	172.848.901	33.000.000	33.000.000
Dep. Kehutanan	55.237.980	135.441.753	121.857.102	153.418.257	94.437.984
DEP. Kelautan & Perikanan	576.462.606	711.302.420	781.129.702	457.265.579	216.993.074
Dep. Kes	3.077.182.046	2.672.608.325	2.507.112.552		105.823.320
Dep. Keu					
Dep. Kominfo			12.749.000		
DPU	142.689.777	172.149.117	279.163.722	177.278.892	125.208.988
Dep. Diknas	9.243.713.247	17.943.304.867	17.494.281.164	21.754.647.285	32.357.922.814
Dep. Perdagangan	69.250.000	76.314.800	86.622.770	60.653.753	53.873.000
Dep. Hub			115.596.185		
Dep. Perin	55.350.000	72.094.000	153.000.000	61.410.781	67.956.241
Dep. Tan	1.936.179.420	1.109.241.100	1.263.278.023	1.048.445.504	944.799.950
Dep. SOS	1.007.194.000	965.036.965	901.716.519	752.192.231	633.573.758
Depnakertrans	531.542.214	478.452.312	200.874.036	145.829.190	147.429.508
Kemenneg Pemb Dae Tertinggal					
Kemenneg Kop&UKM	230.450.000	209.598.580	210.000.000	118.500.000	133.775.000
Kemenneg Lingkungan Hidup		2.400.000	6.300.000	16.500.000	16.000.000
Kemenneg Pemuda & Olah Raga	112.000.000	110.700.000	116.400.000	116.400.000	144.100.000
Kemenneg Perumahan Rakyat					
Perpustakaan Nas. RI	7.821.985	9.625.000	38.000.000	68.085.000	70.000.000
Total Dekon Nas	17.971.658.598	24.963.411.410	24.608.501.627	25.212.280.650	35.880.970.935
% dekon diknas/ dekon nasional	0,51	0,72	0,72	0,99	0,92

Sumber data: DJPK

Lampiran 7

**Tabel : Alokasi Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Per Provinsi
Tahun 2005 – 2009 (dalam ribuan rupiah)**

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009
NAD	311.744.210	547.417.002	394.831.956	503.829.512	745.505.983
Sumatera Utara	613.812.770	1.094.421.385	1.073.061.745	1.293.720.574	2.026.077.816
Sumatera Barat	245.797.756	431.704.643	440.969.906	552.151.026	891.501.073
Riau	207.871.630	449.411.746	407.733.858	529.759.435	809.811.455
Riau Kepulauan	61.241.405	123.601.517	123.740.585	143.392.144	182.864.648
Jambi	163.767.862	317.282.975	267.893.694	341.428.634	531.761.086
Sumatera Selatan	298.828.581	588.299.580	566.350.765	703.191.549	990.474.925
Bangka belitung	58.672.607	143.427.074	121.197.232	150.262.080	204.863.638
Bengkulu	113.511.610	212.221.933	189.181.385	229.706.308	312.143.239
Lampung	309.572.705	665.961.367	564.695.740	729.748.947	1.153.244.189
Dki Jakarta	264.464.768	585.684.086	628.993.777	820.189.357	1.274.291.600
Jawa Barat	1.145.615.733	2.413.568.678	2.519.225.473	3.076.945.718	4.501.927.930
Banten	325.747.068	675.402.641	690.386.319	817.761.329	1.253.996.857
Jawa Tengah	1.068.209.614	2.222.963.177	2.148.429.388	2.675.777.194	4.046.184.319
DI Yogyakarta	145.664.076	302.906.609	380.196.065	393.325.305	568.802.617
Jawa Timur	1.153.570.551	2.243.864.750	2.059.276.054	2.739.744.494	3.916.524.094
Kal. Barat	210.735.062	417.646.062	392.483.958	497.141.253	754.561.610
KalTeng	135.292.392	251.857.899	218.917.483	273.521.362	382.139.322
KalSel	144.669.483	303.610.331	296.220.349	372.485.642	532.664.308
Kal. Timur	166.479.488	303.620.209	309.887.329	384.871.925	542.849.620
Sulawesi Utara	133.095.685	222.259.405	241.901.757	317.184.355	430.378.669
Gorontalo	86.234.396	129.065.654	135.510.892	172.107.814	285.309.364
SulTeng	146.608.130	279.549.898	252.453.597	327.912.074	504.769.974
SulSel	467.344.314	687.433.554	701.267.974	852.160.082	1.334.704.498
Sulawesi Barat		48.398.650	122.171.750	163.733.816	232.356.454
SulTra	134.267.039	244.082.284	235.914.169	308.467.865	475.193.012
Bali	162.680.405	293.377.458	302.603.645	382.111.252	553.789.567
NTB	209.388.703	411.708.401	393.938.159	481.175.606	774.409.750
NTT	234.009.107	468.543.909	486.441.313	602.262.443	879.636.406
Maluku	179.170.946	256.407.537	219.691.483	255.941.002	367.059.688
Maluku Utara	134.132.409	191.510.643	190.235.472	176.661.070	220.805.386
Papua	142.871.929	301.451.492	307.432.585	347.547.099	508.102.664
Irian Jaya Barat	68.640.813	114.642.318	111.045.307	138.429.019	169.217.053
Total Dekon Diknas	9.243.713.247	17.943.304.867	17.494.281.164	21.754.647.285	32.357.922.814

Sumber data DJPK

Lampiran 8

Tabel : Alokasi Dana Dekonsentrasi Mandikdasmen per provinsi (dalam ribuan rupiah)

Provinsi	2006	2007	2008	2009
Nangro Aceh Darusalam	581.500.998	337.906.343	372.191.650	460.859.773
Sumatera Utara	972.351.844	924.068.014	973.923.397	1.303.801.006
Sumatera Barat	363.459.245	371.167.362	399.565.293	495.217.006
Riau	381.744.754	358.170.718	413.462.259	514.633.965
Riau Kepulauan	106.599.442	107.643.551	120.331.583	136.720.952
Jambi	271.948.813	213.514.800	245.074.560	326.053.511
Sumatera Selatan	493.306.713	473.373.826	538.636.305	698.852.096
Bangka belitung	141.529.596	96.563.220	106.307.629	120.156.024
Bengkulu	204.282.887	153.575.764	162.121.769	199.327.143
Lampung	698.527.499	474.534.568	506.877.953	687.386.803
Dki Jakarta	434.366.221	459.572.038	539.302.808	721.791.342
Jawa Barat	2.047.687.023	2.138.575.459	2.395.194.591	3.229.318.175
Banten	600.281.253,00	580.209.609,00	626.067.854,00	829.729.233,00
Jawa Tengah	1.811.775.880	1.753.847.798	1.913.365.424	2.438.410.048
DI Yogyakarta	241.538.069	308.041.265	252.176.131	275.389.273
Jawa Timur	2.019.619.298	1.662.641.003	1.927.160.456	2.333.842.065
Kalimantan Barat	418.577.593	318.212.692	365.716.383	460.049.237
Kalimantan Tengah	239.208.362	175.268.777	199.988.538	225.566.560
Kalimantan Selatan	250.133.283	224.380.268	251.897.842	291.279.194
Kalimantan Timur	250.565.535	253.316.133	289.149.861	356.837.812
Sulawesi Utara	181.069.253	195.972.529	231.546.718	260.212.078
Gorontalo	113.664.234	109.947.758	125.981.684	133.662.169
Sulawesi Tengah	273.391.169	210.091.005	230.499.435	288.472.896
Sulawesi Selatan	539.658.118	574.950.173	595.714.965	772.405.515
Sulawesi Barat	97.235.877	100.119.475	117.404.960	143.287.436
Sulawesi Tenggara	209.830.741	195.493.813	227.405.598	288.790.839
Bali	234.657.200	241.649.754	266.730.272	322.525.234
Nusa Tenggara Barat	416.029.914	289.708.470	316.425.143	416.554.708
Nusa Tenggara Timur	459.787.632	368.573.620	413.180.022	549.134.825
Maluku	246.262.155	178.136.463	185.597.195	224.522.596
Maluku Utara	164.714.951	163.054.648	139.344.941	152.972.203
Papua	268.419.900	213.406.487	247.900.355	270.907.535
Irian Jaya Barat	111.994.253	88.503.269	108.672.584	116.403.077
Total Dekon Dikdasmen	15.845.719.705	14.314.190.672	15.804.916.158	20.045.072.329
Total dana dekon Diknas	17.943.304.867	17.494.281.164	21.754.647.285	32.357.922.814
% dekon Dikdasmen /Diknas	0,88	0,82	0,73	0,62

**Tabel : Alokasi Dana Dekonsentrasi tahun 2009 pada 4 program
Mandikdasmen**

Provinsi	Pendidikan Anak Usia Dini	Wajar Dikdas Sembilan Tahun	Pendidikan Menengah	Mnjm Yandik	Total
Nangro Aceh Darusalam	327.274	381.338.981	77.879.678	1.313.840	460.859.773
Sumatera Utara	444.560	1.141.971.109	159.897.211	1.488.126	1.303.801.006
Sumatera Barat	281.522	445.113.645	48.602.627	1.219.212	495.217.006
Riau	293.618	465.267.773	48.098.054	974.520	514.633.965
Riau Kepulauan	225.950	119.622.415	16.017.697	854.890	136.720.952
Jambi	212.738	293.991.010	30.879.381	970.382	326.053.511
Sumatera Selatan	289.822	622.146.767	75.302.405	1.113.102	698.852.096
Bangka belitung	310.514	102.814.696	16.171.556	859.258	120.156.024
Bengkulu	234.810	168.917.830	29.285.739	888.764	199.327.143
Lampung	268.838	620.799.558	65.370.665	947.742	687.386.803
Dki Jakarta	277.040	641.623.388	78.856.322	1.034.592	721.791.342
Jawa Barat	512.110	3.006.742.899	220.509.458	1.553.708	3.229.318.175
Banten	279.530	764.896.040	63.620.685	932.978	829.729.233
Jawa Tengah	581.582	2.200.575.155	235.344.615	1.908.696	2.438.410.048
DI Yogyakarta	316.002	234.190.143	40.033.140	849.988	275.389.273
Jawa Timur	591.842	2.107.546.988	223.713.021	1.990.214	2.333.842.065
Kalimantan Barat	270.248	411.080.503	47.659.764	1.038.722	460.049.237
Kalimantan Tengah	390.275	194.725.203	29.362.204	1.088.878	225.566.560
Kalimantan Selatan	352.310	258.859.533	30.964.471	1.102.880	291.279.194
Kalimantan Timur	315.500	312.115.078	43.176.206	1.231.028	356.837.812
Sulawesi Utara	384.578	222.235.636	36.676.004	915.860	260.212.078
Gorontalo	280.086	117.403.576	15.168.947	809.560	133.662.169
Sulawesi Tengah	238.642	253.685.177	33.603.591	945.486	288.472.896
Sulawesi Selatan	313.271	689.312.970	81.338.092	1.441.182	772.405.515
Sulawesi Barat	219.242	124.787.752	17.458.746	821.696	143.287.436
Sulawesi Tenggara	246.950	250.633.127	36.926.796	983.966	288.790.839
Bali	237.512	287.246.380	33.941.481	1.099.861	322.525.234
Nusa Tenggara Barat	343.560	368.360.294	46.886.146	964.708	416.554.708
Nusa Tenggara Timur	307.120	492.162.512	55.406.169	1.259.024	549.134.825
Maluku	250.054	178.922.598	44.379.874	970.070	224.522.596
Maluku Utara	246.160	121.477.678	30.307.359	941.006	152.972.203
Papua	358.290	222.847.328	46.045.786	1.656.131	270.907.535
Irian Jaya Barat	256.760	97.197.786	17.727.326	1.221.205	116.403.077
Total Dekon Dikdasmen	10.458.310	17.920.611.528	2.076.611.216	37.391.275	20.045.072.329

Sumber Ditjen Mandikdasmen Kementerian Diknas









APBD dan PAD Provinsi tahun 2009 (dalam juta rupiah)

WILAYAH (PROV)	PENDAPATAN	PAD
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	6.732.212,00	795.872,00
Provinsi Sumatera Utara	3.249.000,00	2.104.203,00
Provinsi Sumatera Barat	1.523.896,00	723.758,00
Provinsi Riau	3.663.103,00	1.276.253,00
Provinsi Kepulauan Riau	1.330.000,00	424.687,00
Provinsi Jambi	1.256.887,00	480.310,00
Provinsi Sumatera Selatan	2.681.672,00	1.171.643,00
Provinsi Bangka Belitung	812.036,00	255.263,00
Provinsi Bengkulu	1.007.090,00	421.731,00
Provinsi Lampung	1.650.092,00	798.874,00
Provinsi DKI Jakarta	20.674.548,00	11.134.548,00
Provinsi Jawa Barat	6.951.984,00	5.176.292,00
Provinsi Banten	2.220.917,00	1.526.456,00
Provinsi Jawa Tengah	5.208.348,00	3.624.720,00
Provinsi DI Yogyakarta	1.221.594,00	596.851,00
Provinsi Jawa Timur	5.950.572,00	3.886.986,00
Provinsi Kalimantan Barat	1.478.166,00	514.889,00
Provinsi Kalimantan Tengah	1.528.829,00	502.270,00
Provinsi Kalimantan Selatan	1.638.465,00	853.488,00
Provinsi Kalimantan Timur	5.011.283,00	1.588.513,00
Provinsi Sulawesi Utara	1.028.716,00	309.720,00
Provinsi Gorontalo	534.505,00	76.980,00
Provinsi Sulawesi Tengah	1.062.741,00	231.784,00
Provinsi Sulawesi Selatan	2.209.465,00	1.301.646,00
Provinsi Sulawesi Barat	574.142,00	64.000,00
Provinsi Sulawesi Tenggara	1.264.927,00	472.992,00
Provinsi Bali	1.409.543,00	851.118,00
Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.244.401,00	468.210,00
Provinsi Nusa Tenggara Timur	954.424,00	223.848,00
Provinsi Maluku	916.236,00	157.725,00
Provinsi Maluku Utara	721.409,00	80.630,00
Provinsi Papua	5.322.085,00	345.398,00
Provinsi Papua Barat	2.881.160,00	64.920,00
	95.914.448,00	42.506.578,00

Sumber data, LHA BPK tahun 2009



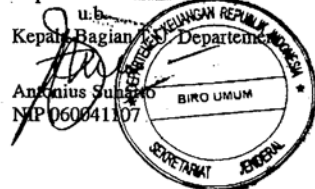
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174 /PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1,0053	Tinggi
2	Provinsi Sumatera Utara	0,5654	Sedang
3	Provinsi Sumatera Barat	0,9763	Sedang
4	Provinsi Riau	2,0529	Sangat Tinggi
5	Provinsi Jambi	1,3824	Tinggi
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,5820	Sedang
7	Provinsi Bengkulu	0,5963	Sedang
8	Provinsi Lampung	0,2871	Rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	7,9325	Sangat Tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	0,4167	Rendah
11	Provinsi Jawa Tengah	0,2412	Rendah
12	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,5009	Sedang
13	Provinsi Jawa Timur	0,3093	Rendah
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,7881	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,7362	Tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,4487	Sangat Tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	4,9662	Sangat Tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,8967	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,5015	Sedang
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,5504	Sedang
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,5223	Sedang
22	Provinsi Bali	2,1158	Sangat Tinggi
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,2237	Rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,2974	Rendah
25	Provinsi Maluku	0,4493	Rendah
26	Provinsi Papua	0,5062	Sedang
27	Provinsi Maluku Utara	1,5052	Tinggi
28	Provinsi Banten	0,8514	Sedang
29	Provinsi Bangka Belitung	2,9668	Sangat Tinggi
30	Provinsi Gorontalo	0,6692	Sedang
31	Provinsi Kepulauan Riau	3,1331	Sangat Tinggi
32	Provinsi Papua Barat	1,1359	Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,7863	Sedang

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007, terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum . . .
4. perumahan;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perhubungan;
8. lingkungan hidup;
9. pertanahan;
10. kependudukan dan catatan sipil;
11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13. sosial;
14. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
15. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. penanaman modal;
17. kebudayaan dan pariwisata;
18. kepemudaan dan olah raga;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. statistik;
23. kearsipan;
24. perpustakaan;
25. komunikasi dan informatika;
26. pertanian dan ketahanan pangan;
27. kehutanan;
28. energi dan sumber daya mineral;
29. kelautan dan perikanan;
30. perdagangan . . .
31. perindustrian.

